2014

PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

TIM PENYUSUN
POLTEKKES KEMENKES
SURAKARTA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA

KEMENTERIAN KESEHATAN R I
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta 57127
web site : www.poltekkes-solo.ac.id_ emai : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com Telp. 0271. 856929 Fax. 0271. 855388

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR:HK.04.03/I.01/343.1/2014

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang : a) bahwa untuk dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surakarta Perlu Menetapkan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta;
b) bahwa Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan :
1. Visi, Misi dan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Keputusan Rapat Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi dan Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2014

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Satino, SKM, M.Sc.N NIP.
19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
5. Arsip

KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN

SURAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Suasana akademik sering juga disebut *academic atsmosfere* merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana konduksif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Poltekkes Kemenkes Surakarta menjamin terciptanya suatu suasana yang kondusif dalam rangka tercapainya visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen-mahasiwa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Akhirnya kami mengharapkan agar semua pihak mengikuti pedoman ini

BAB I
PENDAHULUAN

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Iklim kondusif diperlukan untuk mendukung suasana akademik yang optimal. Iklim kondusif di Poltekkes Kemenkes Surakarta memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin. Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa adalah komunikasi diantara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT).

Sesuai dengan Visi dan Misinya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta terus berupaya berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta juga memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan SDM terdidik terlatih yang berkualitas. Poltekkes Kemenkes Surakarta selalu berupaya untuk dapat berperanserta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam pelaksanaan Tri Dharmanya, Poltekkes Kemenkes Surakarta selalu berupaya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menguatkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, para pihak yang berkepentingan dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta (*stakeholders*) dan kecenderungan perkembangan dunia pendidikan mendorong Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk berkomitmen mengupayakan perbaikan terus-menerus dalam kualitas proses pendidikannya, terutama dengan menekankan efisiensi, efektivitas dan produktivitas proses pendidikan yang mengutamakan relevansi kompetensi lulusan ataupun spesifikasi IPTEKS yang dihasilkan. Hal ini diperlukan untuk menjaga eksistensi Poltekkes Kemenkes Surakarta itu sendiri sekaligus meningkatkan peran Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui perwujudan misi dan visinya. Upaya-upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa Poltekkes Kemenkes Surakarta akan dapat terus meningkat, berkembang, dan terkemuka di lingkungan pendidikan tinggi Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Pengembangan Institusi diarahkan menuju *cyber campuz* dan dilakukan secara bertahap. Perubahan dari *teaching university* menjadi *cyber campuz* membutuhkan perubahan yang mendasar, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi yang sehat dan iklim kerja yang kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Telah disadari bersama bahwa tidak mudah untuk menjadi *cyber campuz* dan tantangan yang paling besar adalah menumbuh kembangkan budaya menggunakan media elektronik untuk menelaah hasil penelitian di kalangan sivitas akademika untuk kemudian menjadikan penelitian sebagai dasar dari pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Poltekkes Kemenkes Surakarta berupaya agar pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan dasar hasil penelitian para dosen dengan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa, baik program Diploma III maupun DIploma IV. Penguatan budaya meneliti yang berkualitas di kalangan sivitas akademika memerlukan langkah-langkah yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mulai sekarang akan mengintensifkan upaya-upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terus-menerus di segala bidang kegiatan akademik.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta menyusun rencana strategis untuk pengembangan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta tahun 2015-2019. **Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta 2015-2019** didasarkan pada evaluasi diri untuk menganalisis kondisi sekarang, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta pengaruh lingkungan internal dan lingkungan eksternal terhadap upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Titik berat perencanaan strategis pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta ini adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Aspek-aspek strategis yang dimaksud meliputi :

1. Kinerja penyelenggaraan pendidikan,
2. Kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

3. Kinerja manajemen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta yang meliputi bidang manajemen sumber daya manusia, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi,
4. Budaya organisasi dan suasana akademik, dan
5. Jaringan kerjasama (networking).

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan upaya perguruan tinggi untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang berpotensi akademik untuk mendapat layanan pendidikan tinggi seumur hidup. Isu utama ini juga mencakup pengertian '*life long education*' yang juga berimplikasi bahwa Poltekkes Kemenkes Surakarta harus mengupayakan layanan pendidikan tinggi kepada semua kelompok umur yang secara akademik berpotensi menerima layanan pendidikan tinggi. Perluasan akses tidak hanya membuka peluang bagi WNI dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga mereka yang berdomisili di daerah terpencil, menderita cacat yang secara alamiah tidak relevan atau mengganggu pencapaian akademiknya, bebas bias jender, dan lain-lain.

Isu utama Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing dilakukan terhadap keluaran (output) Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi Poltekkes Kemenkes Surakarta menjadi Institusi Berbasis Riset, pelaksanaan pendidikan/pengajaran dan pengabdian pada masyarakat seyogyanya didasarkan pada hasil-hasil penelitian berkualitas dan relevan yang dilakukan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Isu utama Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik dan Penguatan Sumber Pendanaan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan upaya untuk mewujudkan *Good University Governance (GUG)*. Upaya ini tidak terlepas dari isu utama Penguatan Sumber Pendanaan sebagai pendukung untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tanpa perlu memberikan beban keuangan/pendanaan berlebihan kepada negara maupun masyarakat. Penyehatan organisasi diperlukan karena organisasi yang sehat menjadi prasyarat utama untuk dapat berkontribusi pada kebebasan akademik, inovasi dan kreativitas, mendorong efisiensi, efektivitas, dan tanggungjawab organisasi, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai aset bukan sebagai beban.

Penerapan GUG dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing tentu diarahkan untuk mencapai isu utama Globalisasi dan Daya Saing institusi. Peningkatan daya saing institusi diperlukan untuk menjaga eksistensi dan peran Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan daya saing nasional dilaksanakan dengan mendorong program/disiplin ilmu yang dapat menaikkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan akademik ini disusun dengan mengacu pada Renstra **POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 2015-2019** dan digunakan sebagai acuan kebijakan dasar dalam perumusan peraturan, standar prosedur, dan rencana pengembangan akademik di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kebijakan akademik ini selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program-program akademik yang telah disusun dan disepakati. Hal ini merupakan upaya Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk mendorong terwujudnya Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai *cyber campus* dan sebagai upaya untuk secara berkelanjutan meningkatkan dan memperbaiki mutu kegiatan akademik.

BAB II
FALSAFAH DAN DASAR KEBIJAKAN

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta bertekad menjadikan Institusi sebagai **"Wahana pengembangan masyarakat madani yang berjiwa Pancasila, berbudi pekerti luhur, berkarakter budaya bangsa Indonesia yang penuh semangat pengabdian",** sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta berusaha menerapkan nilai-nilai keilmuan dengan mengedepankan proses pembelajaran yang **asih, asah, asuh,** sehingga mampu menumbuhkan kepribadian mahasiswa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan serta memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta memiliki budaya kerja **5 R,** yaitu **Rapi, Resik, Ringkas, Rawat, Rajin** dan mengedepankan budaya layanan **5 S** yaitu **Senyum, Salam, Sapa, Sentuh, Servis,** serta dengan memadukan pepatah **"MENSANA IN CORPORE SANO"** sehingga mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan yang akan dibahas selanjutnya.

2.2 NILAI-NILAI DASAR

Perguruan tinggi pada hakekatnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk melestarikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu perguruan tinggi juga berfungsi mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dalam era globalisasi, informasi, dan interdepedensi sebagaimana yang telah, sedang, dan akan berlangsung, peran perguruan tinggi menjadi semakin penting. Dalam era tersebut keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, penguasaan informasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 PRINSIP DASAR

Berkaitan dengan persoalan di atas, eksistensi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta ke depan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta perlu secara terus-menerus mempertinggi daya saing dan daya juang guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berdasarkan landasan filosofi dan pemikiran di atas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut :

2.3.1 Visi

Visi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta adalah **"Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"**

2.3.2 Misi

Misi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta adalah sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai centre of excellent.
b) Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
c) Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
d) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
e) Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
f) Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan.

2.3.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta adalah:

a) Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global.
b) Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam penyelenggaraan tata kelola pendidikan yang akuntabel.

c) Menghasilkan karya-karya penelitian sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan.
d) Menerapkan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.
e) Menghasilkan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
f) Menghasilkan produk dan jasa melalui kegiatan kewirausahaan dan diversifikasi usaha di bidang kesehatan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS

3.1 ISU-ISU STRATEGIS

3.1.1 Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing

Memasuki millenium ketiga sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan tingkat nasional sedang dan akan menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Di antara permasalahan-permasalahan tersebut adalah gejala semakin menguatnya arus globalisasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan arah kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Millenium ketiga merupakan era globalisasi dan informasi. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menyetujui dan terlibat aktif dalam berbagai kesepakatan global, seperti WTO, GATT, APEC, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), MDG's (Millenium Development Goal's) dan sebagainya. Dalam era globalisasi dan informasi, hampir semua faktor produksi seperti uang, teknologi, jasa, pabrik dan peralatan dapat bergerak melintasi tapal batas negara tanpa kesulitan berarti. Dunia terasa menjadi semakin sempit, jarak terasa semakin dekat, waktu terasa berjalan semakin cepat dan mobilitas orang dan barang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Implikasi-implikasi yang dimaksud adalah: Pertama, tenaga kerja terdidik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan semakin besar, sehingga persaingan dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi semakin ketat. Kedua, perguruan tinggi dalam dan luar negeri akan semakin mudah menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, sehingga calon mahasiswa mempunyai peluang yang tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk menarik mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya menyangkut output, melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya manusia, fasilitas maupun manajemen. Berkaitan dengan tersebut penyelenggara pendidikan harus memperhatikan kualitas calon mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.

Indonesia sebagai anggota ASEAN harus siap menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015. Melalui MEA, pasar besar kawasan ASEAN yang dalam bidang kesehatan akan menyebabkan terbukanya pasar baru bagi jasa pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terampil di kawasan ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme tenaga kesehatan agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tentunya, profesionalitas tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan tersebut ditunjukkan dengan tingkat kompetensi dan ketaatan prosedur.

3.1.2 Penerapan otonomi perguruan tinggi

Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah implementasi otonomi pendidikan. Pemberlakuan otonomi perguruan tinggi mempunyai implikasi-implikasi sebagai berikut: (1) pengurangan subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri (PTN), (2) strategi yang ditempuh oleh PTN dalam menggali sumber dana lain di luar subsidi pemerintah, dan (3) strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi (PTN dan PTS) dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi, terutama dalam menjaring calon mahasiswa.

Berkaitan dengan implementasi otonomi pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri berada dalam posisi lebih diuntungkan daripada Perguruan Tinggi Swasta, karena dua alasan. Pertama, pemerintah masih memberikan subsidi yang berupa gaji pegawai negeri, sehingga Perguruan Tinggi Negeri tidak perlu mencari dana untuk menggaji karyawan. Kedua, rata-rata Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki Sumber Daya Manusia yang lebih baik daripada rata-rata Perguruan Tinggi Swasta, terutama dalam aspek jabatan akademik dosen, meskipun dalam hal kewirausahaan (entrepreneurship) rata-rata Perguruan Tinggi Swasta secara relatif telah memiliki pengalaman lebih baik daripada rata-rata Perguruan Tinggi Negeri.

Strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi lain dalam mengimplementasikan otonomi pendidikan tinggi, terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, akan menambah daya tampung mereka agar lebih banyak calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kecenderungan penggunaan strategi ini mulai terlihat secara signifikan sejak tahun akademik 2000/2001, ketika berbagai

Perguruan Tinggi Negeri, sekurang-kurangnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, meningkatkan daya tampung mereka dan strategi tersebut berkonsekuensi logis pada menurunnya jumlah pendaftar pada sebagian besar Perguruan Tinggi Swasta Se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tiga tahun terakhir. Strategi ini cenderung ditempuh karena berkaitan dengan upaya Perguruan Tinggi Negeri untuk dapat mandiri, baik dalam penggalian maupun pengelolaan dana, sehingga Perguruan Tinggi Negeri tidak lagi banyak tergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah, terutama pada pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pemeliharaan berbagai fasilitas pembelajaran. Di antara upaya-upaya yang dilakukan Perguruan Tinggi Negeri untuk meningkatkan daya tampung tersebut adalah menyelenggarakan kelas paralel, membuka berbagai program diploma, membuka program ekstensi (bahkan program ekstensi untuk freshmen atau calon mahasiswa yang baru lulus dari SMU) dan pengembangan profesi. Peningkatan daya tampung ini berkaitan erat dengan jumlah dana yang bisa diperoleh dari calon mahasiswa. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah *spill-over* (limpahan) calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang selama ini menjadi konsumen utama Perguruan Tinggi Swasta menjadi semakin kecil, sehingga perolehan calon mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta juga semakin kecil dan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta dapat terancam.

3.1.3 Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing

Strategi yang ditempuh oleh Perguruan Tinggi Negeri dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terutama dalam menjaring calon mahasiswa, terdapat kecenderungan bahwa masing-masing perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai jaringan (*networking*) dengan berbagai intitusi untuk berbagai keperluan, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya adalah bila Perguruan Tinggi Negeri tidak siap dengan langkah-langkah serupa, maka dapat diperkirakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mampu mengakses berbagai *resources* yang ada di berbagai institusi.

Berdasarkan Undang Undang RI No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya, Tantangan pengembangan Tenaga Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah : pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan Tenaga, kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan pada umumnya masih belum memadai, pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang, pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut Perlu adanya upaya pengembangan pendidikan profesi.

Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Permendikbud no 49 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Standar Nasional Perguruan Tinggi terdiri dari: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian masyarakat. Masing-masing Standar tersebut memiliki ruang lingkup standar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) disebutkan bahwa Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan sampai tingkat program magister terapan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan tersebut, diantaranya tenaga pendidik dan kependidikan maupun sarana prasananya. Berdasarkan KKNI tersebut kurikulum pendidikan berbasis kompetensi. Dengan demikian untuk pencapaian kompetensi tersebut harus ditunjang dengan kualitas pendidik yang memadai, tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang menunjang (*e-learning*, *e-library*, *teleconference*, *e-academic*, laboratorium dll).

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Majelis Tenaga

Kesehatan Indonesia (MTKI) merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, MTKI melakukan beberapa fungsi antara lain uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi bagi peserta didik di perguruan tinggi bidang kesehatan. Penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh MTKI bekerja sama dengan insititusi penyelenggara pendidikan. Oleh sebab itu sebagai salah satu penyelenggara pendidikan bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dan menfasilitasi terlaksananya uji kompetensi tersebut baik persiapan peserta didik maupun sarana prasarana lainnya.

3.2 ISU STRATEGIS DALAM KEBIJAKAN AKADEMIK

Seluruh Kebijakan Akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta harus mempertimbangkan ketiga isu strategis tersebut di atas jika relevan. Perumusan Kebijakan Akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta mencakup Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Institusional. Isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam Kebijakan Akademik Poltekkes Kemenkes Surakarta pada bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut.

3.2.1 Bidang Pendidikan Dan Kemahasiswaan

1) Penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan berkualitas nasional, serta relevan dengan kepentingan masyarakat.

2) Keterbatasan berbagai sumberdaya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas, untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

3) Pengembangan dan penguatan *soft-skill* termasuk pembangunan karakter mahasiswa untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat.

4) Peran alumni untuk meningkatkan pencitraan publik Poltekkes Kemenkes Surakarta, proses dan kualitas hasil pembelajaran, dan *networking*.

3.2.2 Bidang Penelitian

Pengembangan relevansi dan kualitas penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan daya saing bangsa.

3.2.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sedapat mungkin juga menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

3.2.4 Bidang Kerjasama Institusional

Perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

BAB IV
KEBIJAKAN AKADEMIK

4.1 BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN

4.1.1 Tujuan Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global.

4.1.2 Kebijakan Dasar

1) Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui peningkatan kualitas masukan (mahasiswa baru).
2) Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan relevansi lulusan serta mengembangkan dan menerapkan proses belajar mengajar yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai untuk berperanserta aktif secara positif dalam masyarakat. Proses belajar mengajar yang diterapkan seyogyanya memanfaatkan teknologi pendidikan pengajaran yang inovatif, efektif, efisien, dan senantiasa dipelihara kemutakhirannya.
3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan bakatnya dan memberikan pengalaman belajar yang maksimal kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilannya, termasuk meningkatkan penguasaan *softskills* yang diperlukan untuk menjadi lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global.
4) Memberikan akademik atmosfir dan suasana belajar yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.
5) Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern untuk mendukung penerapan proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.
6) Mengembangan dan menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan yang efektif dan efisien.

4.1.3 Kebijakan *Operasional*

1) Kebijakan Operasional dalam lingkup seleksi calon mahasiswa :
   a. Memperbanyak jenis seleksi masuk untuk menjaring calon mahasiswa berpotensi (metode PMDP Umum; metode PMDP GAKIN; dan jalur Uji Tulis);
   b. Meningkatkan efektivitas dan relevansi tolok ukur dan persyaratan dalam proses seleksi masuk calon mahasiswa;
   c. Meningkatkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan akuntabel;
   d. melaksanaan tes kesehatan bagi setiap calon mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta juga harus bebas narkoba.
   e. Setiap WNI yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa, mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi dengan alasan suku, bangsa, bahasa, agama dan keyakinan serta gender untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta.
   f. Setiap mahasiswa wajib beragama dan mengamalkan aturan agamanya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan etika akademik, menghormati bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus
   g. Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan akademik dan peraturan lain yang berlaku di dalam kampus.

2) Kebijakan Operasional dalam lingkup proses pembelajaran :
   a. Kurikulum yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta disusun untuk mencapai kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Penyusunan Kurikulum juga harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, serta kebutuhan pembangunan.

b. Sistem pembelajaran diarahkan pada pembentukan sumberdaya manusia berkualitas yang berpotensi untuk menjadi tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif di pasar global.

c. Sesuai visi dan misi, tujuan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surakarta, setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, kreatif, dinamis, dialogis, menyenangkan, serta menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan yang universal.

d. Setiap dosen wajib menunjukkan profesionalisme kerja di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara berkelanjutan, serta memberikan keteladanan perilaku dan sikap berpikir ilmiah dan akademik.

e. Setiap dosen wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, relevan serta transparan terhadap setiap mata kuliah yang diasuh. Evaluasi pembelajaran berdasarkan pada sistem pembelajaran yang berlaku, disetujui dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.

f. Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Perilaku atau tindakan Plagiat, menyontek, mencontoh dengan sengaja karya orang lain tanpa seijin pemilik sah, menyatakan kehadiran seseorang di dalam kelas/lab/kegiatan akademik lainnya secara tidak sah, merusak/mencuri karya orang lain dan sumber-sumber belajar yang tersedia merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

h. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium yang terakreditasi secara bertahap untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik.

i. Mengembangkan suasana akademik melalui otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik

j. Pengembangan metode pembelajaran berbasis SCL dengan filosofi Asih, Asah dan Asuh

k. Penerapan proses pendidikan dengan 5 S (Senyum, Sapa, Sopan, Sentuh, Servis)

l. Penerapan proses pendidikan dengan memperhatikan budaya lokal

m. Terlaksananya kegiatan Pengenalan Program Studi dengan materi pembangunan karakter

3) Kebijakan Operasional dalam lingkup keluaran :

a. Setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir yang relevan dengan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Standar mutu lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk *softskills* dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan IT dan bahasa asing.

c. Setiap lulusan wajib menjadi anggota Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi Poltekkes.

d. Setiap alumnus wajib menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta martabat bangsa dan negara dimanapun berada, seperti yang diucapkan dalam sumpah lulusan pada saat wisuda.

e. Setiap alumnus diharapkan mampu menjadi pelopor dan dinamisator pembangunan.

f. Setiap alumnus tetap berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperoleh informasi perkembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta.

4.2 BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN

4.2.1 Tujuan Pengembangan Penelitian

Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas Maupun Kualitas Penelitian yang Berkelanjutan Melalui Berbagai Program Penelitian

4.2.2 Kebijakan dasar

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
2. Meningkatkan relevansi penelitian untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelaksanaan Riset Bina bagi Tenaga Kesehatan melalui berbagai program penelitian (Program Riset Mandiri Dosen, Pemula, Hibah Bersaing, dan Program Unggulan Perguruan tinggi yang mampu mengatasi masalah dan bahkan mampu memberikan solusi yang bersifat antisipatif, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan; pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan daya saing bangsa melalui penerapan teknologi.
4. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian kerjasama yang mendorong peningkatan pendapatan institusi dan sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui peningkatan peran Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam rangka peningkatan penerapan iptek di masyarakat.
5. Mengembangkan manajemen penelitian yang efisien, transparan, *accountable*, dan berkualitas untuk mendorong penyelenggaraan penelitian-penelitian unggul dan berkualitas di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

4.2.3 Kebijakan Operasional

1) Kebijakan operasional dalam lingkup <u>Unit penelitian</u>

a. Penataan ulang dan penguatan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) unit penelitian di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta terutama untuk menciptakan pengelolaan penelitian yang *accountable*, transparan, efisien, dan untuk mendorong dan memperkuat perluasan jalinan kerjasama.

b. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta menetapkan dan memberlakukan sistem penjaminan mutu dan standar mutu (proses dan keluaran) dan kinerja unit penelitian di lingkungan Poltekkes, termasuk sistem pemantauan (monitoring) dan evaluasi semua penelitian yang diselenggarakan atas nama Poltekkes Kemenkes Surakarta.

c. Unit penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta harus menerapkan sistem yang dapat memantau aktivitas penelitian dosen, dan menjalankan mekanisme yang efektif untuk menjamin keikutsertaan dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam kegiatan-kegiatan penelitian secara proporsional.

2) Kebijakan Operasional dalam lingkup masukan Penelitian

a. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh peneliti (dosen dan mahasiswa secara berkeadilan dan transparan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

b. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Untuk menjamin hal ini, Lembaga Penelitian perlu menerapkan sistem seleksi yang efektif, *accountable*, dan transparan dalam mekanisme kompetisi pendanaan penelitian.

c. Poltekkes Kemenkes Surakarta mengupayakan penyediaan dan akses sistem informasi IPTEK mutakhir bagi semua peneliti Poltekkes Kemenkes Surakarta

d. Poltekkes Kemenkes Surakarta mengupayakan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi para peneliti dalam perencanaan, pelaksanaan dan publikasi/diseminasi hasil-hasil penelitian; baik penelitian yang bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.

3) Kebijakan Operasional dalam lingkup proses Penelitian

a. Kompetensi penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta ditetapkan berdasarkan **RIP** Poltekkes Kemenkes Surakarta pada bidang ilmu masing-masing, sejalan dengan visi dan misi untuk mencapai tingkat keunggulan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam bidang penelitian.

b. Pembelajaran penelitian diarahkan untuk membentuk peneliti berkualitas, yang mampu melaksanakan penelitian, baik dengan pendekatan monodisiplin, multi-disiplin maupun interdisiplin.

c. Setiap peneliti Poltekkes Kemenkes Surakarta berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian yang unggul, berkualitas, inovatif-kreatif, efisien, berdaya saing**,** sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

d. Kelembagaan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang profesional dan efisien sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

e. Kelembagaan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian untuk menjamin akuntabilitas penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

f. Poltekkes Kemenkes Surakarta berkewajiban menyediakan **prasarana dan sarana penelitian yang memadai** untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang unggul dan berkualitas.

g. Dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi dan relevansi penelitian, setiap Jurusan/ Prodi /Bagian Penelitian berkewajiban menyusun Agenda Riset sesuai dengan bidang keilmuannya dengan mengacu pada perkembangan RISTEK nasional dan internasional.

4) Kebijakan operasional dalam lingkup hasil penelitian

a. Setiap peneliti wajib mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya sesuai kaidah-kaidah dan standar mutu publikasi ilmiah.

b. Standar mutu hasil-hasil penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengacu kepada perkembangan IPTEK, kebutuhan *stakeholders* dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.

c. Setiap peneliti Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik peneliti.

d. Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib memfasilitasi dan mendorong publikasi ilmiah reguler di Poltekkes Kemnekes Surakarta.

e. Melaksanakan Penyelenggaraan publikasi ilmiah hasil penelitian baik melalui web dan maupun melalui Media Jurnal berkala Ilmiah cetak.

f. Perilaku atau tindakan Plagiat, menyontek, mencontoh, menjiplak dengan sengaja karya orang lain tanpa seijin pemilik sah atau tanpa mencantumkan sitasi, menyatakan kehadiran seseorang di dalam proses penelitian dan lainnya secara tidak sah, merusak/mencuri karya orang lain dan sumber-sumber penelitan sebelumnya yang tersedia merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

4.3 BIDANG PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.3.1 Tujuan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat

Menerapkan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

4.3.2 Sasaran Pengembangan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan Pengabdian Masyarakat

4.3.3 Kebijakan Dasar

Pengaplikasian hasil Penelitian kedalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

1) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh hasil-hasil penelitian untuk mewujudkan keunggulan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
2) Peningkatan relevansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang efektif, termasuk optimalisasi mekanisme monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.
3) Peningkatan motivasi dan kemampuan dosen dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4) Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5) Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen pengabdian kepada masyarakat melalui penataan kembali peran dan fungsinya dan penyehatan organisasi/unit kerja terkait.
6) Peningkatan peran nyata Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam pembangunan bangsa sekaligus peningkatan pendapatan institusi dari kegiatan layanan masyarakat.

4.3.4 Kebijakan Operasional

1) Tersusunnya Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2) Tersusunnya Pedoman dan SOP Pengabdian kepada Masyarakat
3) Keikutsertaan dosen dalam mengikuti pelatihan pengembangan kegiatan pengabdian
4) Terbentuknya daerah binaan

5) Terselenggaranya pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa secara terkoordinir dan periodic
6) Terlaksananya pengaplikasian hasil Penelitian kedalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
7) Terlaksananya pengelolaan desa binaan/lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat
8) Tersedianya alat, bahan, transportasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat
9) Terlaksananya jejaring lintas sektor dan lintas program dalam peningkatan pengabdian masyarakat
10) Tersedianya dana untuk pihak eksternal untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
11) Terpublikasikannya hasil pengabdian kepada masyarakat kedalam Jurnal ilmiah/majalah/media massa

4.4 BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA INSTITUSIONAL

4.4.1 Tujuan Pengembangan Kerjasama Institusional

Menghasilkan Kerjasama dengan Pihak Lain Dalam Lingkup Regional, Nasional, dan Internasional untuk Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4.4.2 Kebijakan Dasar

1) Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional
2) Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan
3) Meningkatnya jumlah penerima beasiswa gakin
4) Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan user / steakholder.

4.4.3 Kebijakan Operasional

1) Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional :
   a. MoU dengan Lahan Praktek
   b. MoU dengan Dinas Kesehatan
   c. MoU dengan Kwarcap

d. Mou dengan Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri
e. Mou dengan dengan daerah binaan
f. Kemitraan dalam pengembangan unit-unit usaha

2) Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan
   a. MoU dengan Instansi Pengguna Lulusan
   b. Memfasilitasi bagi institusi pengguna lulusan yang akan melakukan seleksi
   c. Kerja sama dengan alumni

3) Meningkatnya jumlah penerima beasiswa gakin
   a. Seleksi dan verifikasi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu
   b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik
   c. Pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu
   d. MoU dalam pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu dengan pihak sponsor

4) Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan user / steakholder
   a. Mou dalam pengembangan kurikulum pendidikan baik instutusi nasional maupun Internasional
   b. Pertemuan dengan instansi terkait dalam review kurikulum

4.5 BIDANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

4.5.1 Tujuan Pengembangan Kewirausahaan

Menghasilkan Produk dan Jasa Melalui Kegiatan Kewirausahaan & Diversifikasi Usaha di Bidang Kesehatan.

4.5.2 Sasaran

1) Pengembangan Klinik Terpadu
2) Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, dan mahasiswa
3) Pengembangan Gedung Serba Guna Kridha Husada
4) Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana
5) Peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai ajang promosi

4.5.3 Kebijakan Dasar

1) Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, dan mahasiswa
   a. Meningkatkan peran serta dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara seminar tentang kesehatan sesuai yang dibutuhkan masyarakat
   b. Meningkatkan pemberdayaan dosen menjadi narasumber dalam seminar/workshop/pertemuan ilmiah
   c. Meningkatkan pemberdayaan dosen dan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan dalam suatu event masal
   d. Mengembangkan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum
   e. Mengembangkan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum
   f. Peningkatan hubungan yang telah terjalin dengan instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan seminar
   g. Peningkatan pemberdayaan dosen dan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan

2) Mengembangkan pelayanan Klinik Terpadu
   a. Penyusunan proposal ijin operasional klinik
   b. Koordinasi dengan profesi yang terkait dengan pelayanan operasional klinik
   c. Pengusulan proposal program klinik
   d. Penyelenggaraan program klinik

3) Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung Serba Guna Kridha Husada

a. Penyusunan aturan dan tarip yang baku atas pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum

a. Membuka akses penggunaan gedung bagi masyarakat umum

b. Membuka akses penggunaan gedung laboratorium terpadu

c. Membuka akses penggunaan ruang kelas

4) Mengembangkan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat umum

a. Penyusunan aturan dan tarip yang baku atas pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran sebagai wisata pendidikan

b. Mempersiapkan pemandu wisata dan rute wisata pendidikan di dalam lingkungan kampus

c. Menyusun program wisata pendidikan

d. Memberi informasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat umum tentang program wisata pendidikan

Hakikat Suasana Akademik

1. Suasana akademik sering juga disebut *academic atsmosfere* merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana konduksif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta.

3. Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

4. Proses-proses akademik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta bercirikan diskursi yang aktif dan makmur antar-sivitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

1) Suasana akademik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas

akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.

1. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
   a) Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para Ketua Jurusan setiap minggu pada hari Senin untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
   b) Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.

2. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja lapangan, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/skripsi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.

3. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.

4. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.

5. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.

6. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis Poltekkes, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

Sumberdaya Pendukungan Pengembangan Suasana Akademik

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepustakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.

2. Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharan sumberdaya akademik pada Ayat (1), Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta bertaraf internasional menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035.

3. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.

4. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan lahan hijau, kebijakan transportasi dalam kampus, dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.

5. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung perkuliahan, akses perpustakaan, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebarpita sangat lebar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

1. Suasana akademik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.

2. Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
   1) jumlah keluhan sivitas akademika (dosen/mahasiswa),
   2) jumlah karya ilmiah mahasiswa,
   3) jumlah penelitian oleh dosen,
   4) jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
   5) jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen,
   6) jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,

7) jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
8) jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
9) jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
10) jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
11) rata-rata KUM dosen per semester,
12) jumlah sanksi akademik yang diberikan,
13) kondisi sarana dan prasarana akademik,
14) prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
15) jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
16) ketersediaan akses informasi akademik melalui internet.
17) dan lain-lain.